

PENGARUH SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK

Jehuda Bill Jonas^{1*}, Murtanto²

Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia^{1,2}

E-mail: papaje79@gmail.com

ABSTRAK

Pajak sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, keberhasilan kinerja pencapaian realisasi target penerimaan pajak di Indonesia bukan merupakan usaha yang mudah dilakukan. Hal ini tercermin dari tax ratio Indonesia yang masih sangat kecil. Oleh karena itu penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh sosialisasi, kegiatan pengawasan dan tingkat kepatuhan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Data yang digunakan adalah data panel serta metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis data kuantitatif, dimana sampel diambil dari laporan nilai kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini memperluas objek penelitian yang umumnya dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak menjadi unit kantor yang cakupannya lebih besar yaitu Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi, pengawasan dan tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi; Kegiatan Pengawasan; Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Pertumbuhan Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Taxes are needed to finance the development of a country, including Indonesia. However, the successful performance of achieving the realization of tax revenue targets in Indonesia is not an easy effort to do. This is reflected in Indonesia's tax ratio which is still very small. Therefore, research on factors that can affect the success of tax revenue performance is very important to do. The purpose of this study is intended to examine the effect of socialization, supervisory activities and the level of compliance with tax revenue growth. The data used are panel data and the analysis method used, namely quantitative data analysis methods, where samples are taken from the organizational performance value report of the Regional Office of the Directorate General of Taxes for 2018 to 2022. This study expands the object of research generally carried out by previous researchers at the level of the Tax Service Office into an office unit with a larger scope, namely the Regional Office of the Directorate General of Taxes. The results showed that socialization, supervision and compliance levels affect tax revenue growth.

Keywords: Socialization; Surveillance Activities; Level of Compliance of Taxpayer; Tax Revenue Growth



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Salah satu sumber modal yang dimiliki sendiri dan dapat digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan pendirian negaranya adalah pungutan pajak yang diambil dari rakyatnya. Saat ini hampir seluruh negara yang ada didunia menerapkan pengenaan dan pemungutan pajak bahkan beberapa negara di timur tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sebelumnya mengandalkan penerimaan sumber daya alam sebagai sumber penerimaan mulai beralih untuk menerapkan pajak sebagai alternatif sumber pembiayaan negara (Kompas, 2018). Pentingnya pajak bagi pembiayaan negara berlaku juga bagi Negara Indonesia. Sebagai contoh

dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 penerimaan negara yang berasal dari perpajakan tercatat menyumbang sebesar 1.865,7 Triliun atau setara dengan 73,44% (tujuh puluh tiga koma empat puluh empat persen) dari jumlah belanja negara (Kemenkeu, 2020). Hal ini menjadikan pajak sebagai penopang terbesar dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara untuk menyediakan layanan dasar bagi rakyat dan untuk menjalankan roda pemerintahan secara umum (Avisena, 2021). Mengingat peran pentingnya maka setiap upaya untuk mencapai realisasi target penerimaan pajak perlu menjadi perhatian dan tanggungjawab bukan saja oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perwakilan negara tetapi juga oleh rakyat yang menjadi pemikul beban pajak yang sesungguhnya.

Keberhasilan pencapaian realisasi target penerimaan pajak bukan merupakan usaha yang mudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini tercermin dari *tax ratio* Indonesia yang masih kecil dan mengalami tren penurunan (Pink & Laoli, 2021). Kinerja *tax ratio* ini memberikan gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan kegiatan perekonomiannya.

Beberapa penelitian untuk menguji factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak telah dilakukan antara lain oleh (Kepramaeni et al., 2021; Laksmi P & Lasmi, 2021; Larasati & Binekas, 2019; Mulyanti & Sunarjo, 2019; Muzaki et al., 2020; Nadia & Kartika, 2020; Nainggolan & Pinem, 2019; Qodriyah et al., 2018; Rahayu & Mildawati, 2020; Rakhmadhani, 2020; Sayyidah & Nursamsi, 2021; Soliha et al., 2021; Tarfa et al., 2020; Wardana, 2018) namun demikian sebagian besar masih menggunakan data dari objek penelitian yang ruang lingkupnya sangat kecil seperti Kantor Pelayanan Pajak dan menggunakan variable penerimaan pajak sebagai variable dependen. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik dalam penelitian dan melihat pengaruh yang relevan terhadap upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak maka objek penelitian diperluas menjadi data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan menggunakan variable pertumbuhan penerimaan sebagai variabel dependen untuk menggantikan variabel penerimaan pajak.

Literature Review dan Hipotesis

Teori atribusi adalah teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 untuk menjelaskan tentang perilaku suatu individu. Teori ini menyatakan bahwa perilaku suatu individu ditentukan oleh faktor internal (*dispositional attributions*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan faktor eksternal (situasional attributions), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Teori atribusi memberikan landasan untuk mempelajari proses ketika suatu individu menginterpretasikan peristiwa, alasan, atau sebab dari perilaku yang dilihat. Menurut *IndoPositive* (IndoPositive, 2019) penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu kehususan, konsensus dan konsistensi. Teori atribusi ini digunakan sebagai landasan untuk menguji pengaruh factor Sosialisasi, Kegiatan Pengawasan dan Tingkat Kepatuhan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Salah satu faktor internal dari seseorang untuk berperilaku adalah kesadaran. Faktor kesadaran inilah yang menjadi faktor penentu yang relevan antara teori atribusi dengan variable sosialisasi yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor kesadaran wajib pajak yang tinggi terhadap hak dan kewajibannya dapat dilihat dari perilaku yang tidak hanya berusaha untuk mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga tercermin dalam perilaku untuk bisa memahami dan mematuhi aturan terkait hak dan kewajiban yang berlaku (Laksmi P & Lasmi, 2021). Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tersebut dilakukan melalui sosialisasi, yaitu suatu kegiatan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat

menciptakan kesadaran masyarakat secara umum dan Wajib Pajak secara khusus untuk membayar pajak guna kelangsungan Negara (Qodriyah et al., 2018).

b. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Umumnya SP2DK berisi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. SP2DK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan kegiatan persuasi yang diharapkan mampu menjadi factor eksternal yang menentukan perilaku Wajib Pajak untuk tetap secara konsisten patuh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

c. Tingkat Kepatuhan

Sistem *self assessment* yang digunakan dalam system perpajakan Indonesia memberikan ruang kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, factor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan perlu diberi perhatian khusus. Sebagai contoh, pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran yang merupakan factor internal Wajib Pajak untuk berperilaku perlu tetap dilaksanakan secara massif dan terstruktur sehingga tercipta respon perilaku positif berupa kesadaran yang ditunjukkan secara konsisten. Selain factor internal, perhatian juga diarahkan untuk mempengaruhi *factor* eksternal seperti upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan ruang pelaporan Surat Pemberitahuan melalui saluran elektronik yang mudah diakses dan diisi untuk menggantikan pelaporan yang bersifat manual. Kombinasi perhatian dan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dilandasi oleh teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seorang dan factor yang menentukan perilaku tersebut.

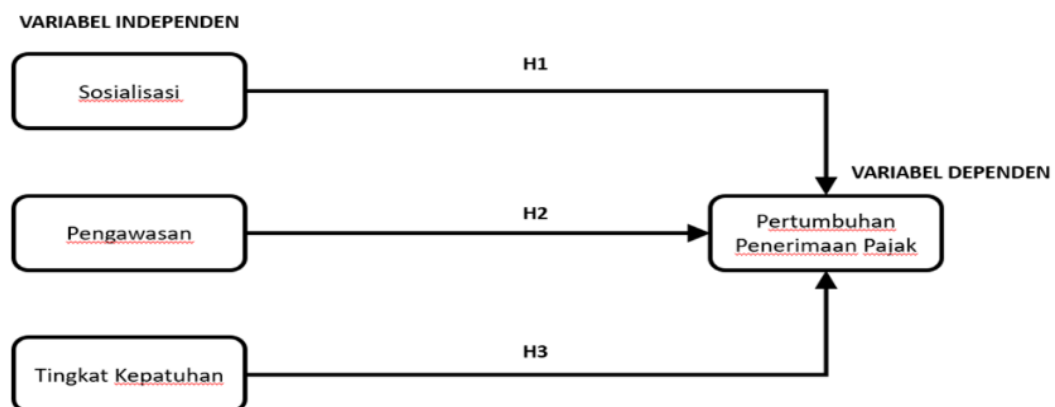
Berdasarkan teori atribusi dan penjelasan terhadap faktor-faktor tersebut diatas disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sosialisasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak.

H₂: Kegiatan pengawasan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak.

H₃: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pertumbuhan penerimaan Pajak.

Kerangka konsep pemikiran dari hipotesis tadi dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konsep Pemikiran

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan sumber data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan 170 unit data sekunder yang diambil dari 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan periode waktu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pengumpulan data dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu 1) pengumpulan data sekunder yang terdokumentasi pada aplikasi internal DJP atau pada laporan kinerja Kanwil DJP dan 2) pengumpulan data kepustakaan terkait variabel penelitian yang terdapat pada jurnal, artikel ilmiah, dan buku Pendidikan. Pelaksanaan Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan dan pengaruh pelaksanaan sosialisasi, kegiatan pengawasan dan tingkat kepatuhan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

Pengukuran Variabel

Jenis, cara pengukuran dan skala pengukuran dari variable yang digunakan dalam penelitian ini tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Pengukuran Variabel

Jenis Variabel	Cara Pengukuran	Skala Pengukuran
Pertumbuhan penerimaan pajak	$P = \frac{P2 - P1}{P1} \times 100$ <p>PP = Pertumbuhan Penerimaan P1 = Penerimaan Tahun sebelumnya P2 = Penerimaan Tahun Berjalan</p>	Rasio
Sosialisasi	$\text{Sosialisasi} = \frac{\text{Realisasi Sosial}}{\text{Rencana Sosial}} \times 100$	Rasio
Kegiatan Pengawasan	$\text{Pengawasan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan dari Kegiatan Pengawasan}}{\text{Rencana Sosial}} \times 100$	Rasio
Tingkat Kepatuhan	$\text{Pengawasan} = \frac{\text{Jumlah SPT Yang Tahunan Badan dan SPT Tahunan Orang Pribadi Yang di Terima Pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Wajib SPT Per Tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya}} \times 100$	Rasio

Metode Analisis Data

Dalam penelitian yang telah dikumpulkan disusun menjadi data panel yang memiliki jumlah unit *cross section* dan jumlah observasi *time series* yang sama (data panel balance). Data panel dianalisa melalui beberapa pengujian yaitu 1) pengujian statistik yang bersifat deskriptif, 2) pengujian terhadap permasalahan normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi melalui uji asumsi klasik, 3) pengujian regresi dari data panel yang terbentuk dan 4) pengujian hipotesa melalui uji statistik nilai t, nilai F dan nilai koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan uji statistik deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan software Stata 12 diketahui sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan penerimaan pajak	107	-0.28782	0.74662	0.11402	0.16473
Sosialisasi Kegiatan Pengawasan	170	0.50000	0.98644	0.79867	0.07743
Tingkat Kepatuhan	170	0.05792	0.74417	0.97781	0.66296
		0.52133	1.13060	0.80573	0.10117

Sumber: data diolah Stata

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis	Uraian	Nilai	Hasil
Uji Normalitas	Prob>chibar2	0.0850	tidak ada masalah normalis
Uji Multikolinieritas	Mean VIF	1.09	tidak ada masalah Multikolinieritas
Uji Heteroskedastisitas	Prob>chibar2	0.2213	tidak ada masalah Heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi	Nilai Prob> F	0.0000	ada masalah Autokorelasi

Sumber: data diolah Stata

Data penelitian telah disusun menjadi data panel (gabungan data cross section dan data time series) dan menurut Prof. Ghozali (2016) pada saat menggunakan data yang bersifat *time series* sering didapati adanya masalah autokorelasi. Berdasarkan hal tersebut hasil uji autokorelasi diabaikan.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji model terbaik dengan menggunakan Hausman Test, LM Test, dan Chow Test diketahui uji hipotesis terbaik dapat dilakukan dengan menggunakan model Common Effect dibanding penggunaan model Fixed Effect dan Random Effect. Uji hipotesis dengan menggunakan model Common Effect menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	P> t	Kesimpulan
Sosialisasi	0.5818619	0.000	H1 diterima

Pengawasan	-0.0612232	0.001	H2 diterima
Tingkat Kepemimpinan	-0.2532209	0.032	H3 diterima
Cons	-0.4948574		
Good of Fit Test			
R-Square	0.2141		
Prob > F	0.0000		

Sumber: data diolah Satata

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut: a) Sosialisasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak. b) Kegiatan pengawasan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak. c) Tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya, Masih terdapat factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang masih belum diuji pengaruhnya seperti factor harga komoditas dan penggunaan teknologi untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu besar harapan dari peneliti agar hasil penelitian ini dapat dilanjutkan sehingga melengkapi hasil penelitian sebelumnya serta dapat memberikan gambaran yang lebih sempurna terhadap factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Avisena, M. I. R. (2021, September 18). *Kemenkeu Optimis Target Pajak Tercapai*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/458709/kemenkeu-optimistis-target-pajak-tercapai>
- IndoPositive. (2019). *Pengertian Teori Atribusi (Attribution Theory)*. IndoPositive. <https://www.indopositive.org/2020/09/pengertian-teori-atribusi-attribution.html>
- Kemenkeu. (2020). *Alokasi Pajakmu*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- Kepramaeni, P., Yuesti, A., & Adnyan, Im. D. (2021). Obligation of Tax Mandatory During The Covid-19 Pandemic Period In Economic Decision Frame. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(4), 1–9.
- Kompas. (2018, January 3). *Untuk Pertama Kali, Arab Saudi Terapkan Pajak Pertambahan Nilai*. Kompas.Com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/03/190000926/untuk-pertama-kali-arab-saudi-terapkan-pajak-pertambahan-nilai>
- Laksmi P, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.

- Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak. (Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1339–1354.
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i1.76>
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Nainggolan, B. R. M., & Pinem, S. J. P. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 256–262. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.565>
- Pink, B., & Laoli, N. (2021, March 7). *Mengkhawatirkan, Faisal Basri sebut Penurunan Tax Ratio Indonesia paling Parah*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/mengkhawatirkan-faisal-basri-sebut-penurunan-tax-ratio-indonesia-paling-parah>
- Qodriyah, R. L., Susyanti, J., & Khoirul Abs, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH 25 Badan di KPP Pratama Malang Selatan. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 7(6), 51–64.
- Rahayu, S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(11), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/index>
- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.37577/ekonam.v2i1.202>
- Sayyidah, J., & Nursamsi, D. R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v6i2.4385>
- Soliha, Y. T. T. H., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2021). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan. *Jurnal Aksi: Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 1–10.

- Tarfa, E. G., Tarekegn, G., & Yosef, B. (2020). Effects of Tax Audit on Revenue Generation. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 6(1), 65–74. <http://jital.org/index.php/jital/article/view/155>
- Wardana, A. B. (2018). Nudges Pada SP2DK sebagai Bagian dari Upaya Peningkatan Tax Compliance di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 23–38. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/529>